



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



**Jalan Mawar No. 1 Lubuk Pakam Kodepos 20514
Telepon/Fax : 061-7955556 Website : bkpsdm.deliserdangkab.go.id**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategi instansi.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan dengan sasaran dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Deli Serdang “Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan”, melaksanakan Misi 5, yaitu “Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab”.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023.

Lubuk Pakam,

Januari 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN DELI SERDANG**



Drs. M. ABDUH RIZALI SIREGAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.197106021991011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	3
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	4
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	6
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023	7
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	8
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Capaian Kinerja	12
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	13
3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan	13
3.1.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu	14
3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	15
3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	16
3.1.6 Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	17
3.1.7 Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	18
3.1.8 Analisa Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang	

Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	19
3.2 Realisasi Anggaran.....	22
BAB IV : PENUTUP	24
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023	4
Tabel 2.1	: Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	6
Tabel 2.2	: Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023	7
Tabel 2.3	: Rencana Kinerja Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang	7
Tabel 2.4	: Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023	8
Tabel 2.5	: Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023	9
Tabel 3.1	: Pengkategorian Capaian Kinerja.....	13
Tabel 3.2	: Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	13
Tabel 3.3	: Perbandingan Capaian Kinerja.....	14
Tabel 3.4	: Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	16
Tabel 3.5	: Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.....	17
Tabel 3.6	: Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi.....	17
Tabel 3.7	: Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	18
Tabel 3.8	: Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	19
Tabel 3.9	: Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang	3
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas :

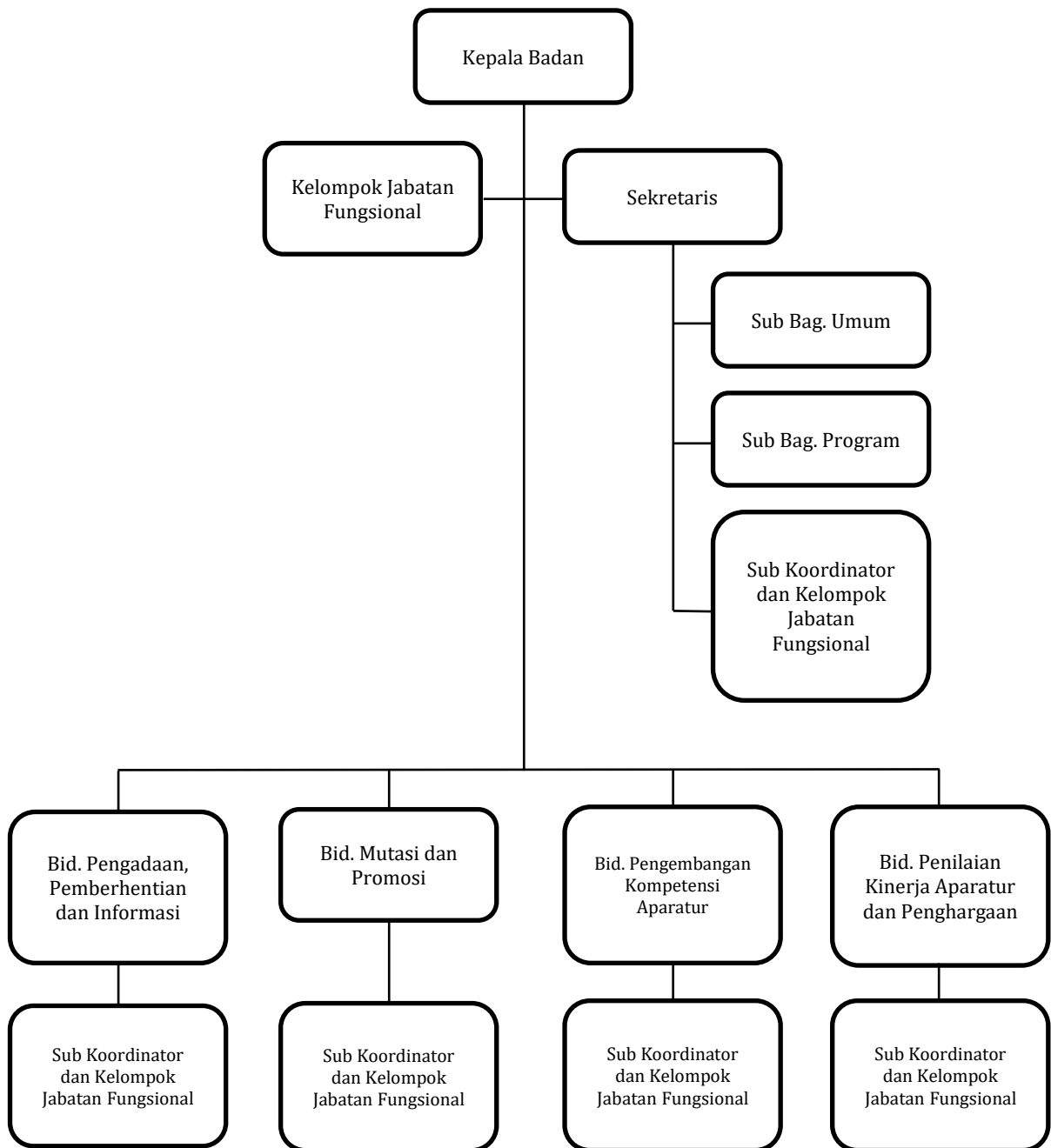
“Membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten”

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
2. Pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
4. Pembinaan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang. Berikut bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Deli Serdang



Sumber : Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 31 Tahun 2022

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang :

Tabel 1.1
Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022

Sumber	Tahun	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	
APBD	Tahun 2022	Rp	18.447.159.927,-
APBD	Tahun 2023	Rp	18.384.095.485,-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022 dan 2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Deli Serdang

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Surat Bupati Deli Serdang Nomor 000.8.6.3/136 tanggal 12 Januari 2024 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2023 dan Perjanjian Kinerja (PK) 2024.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang adalah mewujudkan Aparatur Sipil yang profesional. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah
Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
					2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.1	Meningkatnya Kepegawaian Daerah Yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	69	71	73
		1.2	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN	Persentase pelaksanaan diklat berdasarkan AKD	60	80	100
		1.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	72	73	73
Indeks Kepuasan Masyarakat	85			86	87		

Sumber : Renstra Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang Periode 2022 - 2024

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1		1.1	Indeks Profesionalitas ASN	poin	-		BKN KANREG VI
2		2.1	Persentase pelaksanaan diklat berdasarkan AKD	prosentase		Persentase = $\frac{\text{jumlah diklat yang terlaksana}}{\text{Analisis Kebutuhan Diklat}} \times 100\%$	BKPSDM
3		3.1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	poin	-	-	INSPEKTORAT KABUPATEN
		2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin		$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	BKPSDM

Sumber: Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Deli Serdang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.1	Meningkatnya Kepegawaian Daerah Yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	poin	71
		1.2	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN	Persentase pelaksanaan diklat berdasarkan AKD	persentase	80
		1.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	poin	73

Sumber : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang tahun 2023

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kepegawaian Daerah yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	71 poin
2	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN	Persentase pelaksanaan diklat berdasarkan AKD	80 %
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	73 poin
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 poin

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang :

Tabel 2.5
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks ProfesionalitasASN	71 poin
1.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi KepegawaianASN	Persentase SubKegiatan Pengadaan, Pemberhentiandan Informasi Kepegawaian ASN yang Terlaksana	100 %
1.1.1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen
1.1.2	Koordinasi PelaksanaanAdministrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	850 Dokumen
1.1.3	Fasilitasi LembagaProfesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga

1.1.4	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan
1.2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Sub Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang terlaksana	100 %
1.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	120 Dokumen
1.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	2000 Dokumen
1.2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	1024 Dokumen
1.3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase SubKegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terlaksana	100 %
1.3.1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	300 Orang
1.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SubKegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terlaksana	100 %
1.4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	11000 Dokumen
1.4.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150 Orang
1.4.3	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	20 Orang
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pelaksanaan diklat berdasarkan AKD	80 %
2.1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase SubKegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang terlaksana	100 %
2.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	710 Orang
2.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SubKegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terlaksana	100 %
2.2.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	73 poin
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86 poin
3.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase SubKegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %
3.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan

3.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase SubKegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %
3.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	47 Orang/Bulan
3.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
3.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SubKegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %
3.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 Paket
3.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase SubKegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %
3.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket
3.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Paket
3.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
3.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket
3.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 Paket
3.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6300 Dokumen
3.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan
3.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan
3.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase SubKegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %
3.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit
3.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 Paket

3.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase SubKegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %
3.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik yang disediakan	12 Laporan
3.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase SubKegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %
3.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipeliharadan dibayarkan pajak dan perizinannya	28 unit
3.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	191 Unit
3.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Paket

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023*

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2022- 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Kepegawaian Daerah Yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	71 poin	57,27 poin	80,66 %	Rendah	BKN Kanreg IV
2	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN	Persentase pelaksanaan diklat berdasarkan AKD	80 %	80 %	100 %	SangatTinggi	BKPSDM
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	73 poin	75.27 Poin	103.10 %	SangatTinggi	Inspektorat Kabupaten
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86 poin	96,42 poin	112,11 %	SangatTinggi	BKPSDM

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Tw IV
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Deli Serdang

Uraian penjelasan tabel :

1. Pada sasaran 1 Meningkatnya Kepegawaian Daerah yang Profesional dengan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN dari target yang ditentukan sebesar 71 poin, hanya tercapai 57,27 poin atau sebesar 80,66% dengan kategori **Rendah**.
2. Pada sasaran 2 Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN dengan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Diklat Berdasarkan AKD dari target 80 %, tercapai 80% atau sebesar 100% dengan kategori **Sangat Tinggi**.
3. Pada Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja 1 Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah dari target yang ditentukan sebesar 73 poin, tercapai sebesar 75,27 poin atau 103,10 % dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Dan pada indikator kinerja 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari target yang ditentukan sebesar 86 poin, tercapai 96,42 poin atau sebesar 112,11 % dengan kategori **Sangat Tinggi**.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kepegawaian Daerah Yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	49,81 poin	71 poin	57,27 poin	80,66 %
2	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN	Persentase pelaksanaan diklat berdasarkan AKD	60 %	80 %	80 %	100 %
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHEAKIP Perangkat Daerah	74,89 poin	73 poin	57,27 Poin	103.10 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,34 poin	86 poin	96,42 poin	112,11 %

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang

Uraian penjelasan tabel :

1. Pada realisasi indikator *Indeks Profesionalitas ASN* tahun 2023 mendapat 57,27 poin. Terdapat peningkatan realisasi dari tahun 2022 yang mendapat 49,81 poin atau mengalami peningkatan sebesar 7,46 poin. Realisasi di tahun 2023 masuk kategori rendah, hal ini disebabkan banyak ASN Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah 11.000 orang, sehingga tidak semua ASN mendapatkan kesempatan peningkatan kompetensi sesuai Permendagri yang menjelaskan bahwa setiap ASN dalam 1 tahun mendapatkan pendidikan dan pelatihan minimal 20 JP. Keterbatasan anggaran merupakan salah satu penyebab tidak terakomodirnya seluruh ASN mengikuti pengembangan kompetensi.
2. Pada realisasi indikator *Persentase Pelaksanaan Diklat Berdasarkan AKD*, pada tahun 2023 mencapai 80% sesuai yang ditargetkan, dan mengalami peningkatan realisasi dari tahun 2022 yang terealisasi sebesar 60% atau mengalami kenaikan sebesar 20%. Hal ini sudah sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat yang disusun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang.
3. Pada realisasi indikator *Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah* pada tahun 2023 mendapat 75,27 poin atau meningkat sebesar 0,38 poin dari capaian tahun 2022 yang mendapat poin sebesar 74,89. Hal ini dikarenakan peran aktif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang dalam mempersiapkan dan melengkapi dokumen yang diminta Inspektorat Kabupaten untuk penilaian LKIP Perangkat Daerah.
4. Pada realisasi indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* pada tahun 2022 mendapat 96,42 poin dibandingkan tahun 2022 yang mendapat 83,34 poin atau menurun sebesar 13,04 poin. Untuk menyikapi hal ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang, akan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang

periode 2022-2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatkan Kepegawaian Daerah Yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	57,27 poin	73 poin	78,45 %
2	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN	Persentase pelaksanaan diklat berdasarkan AKD	80 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	75,27 poin	73 poin	103.10 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96.42 poin	87 poin	110,82 %

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Tw IV
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Deli Serdang

Uraian penjelasan tabel :

Pada tahun keempat (2023) Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang, tingkat kemajuan realisasi kinerja sudah menunjukkan hasil yang baik, dibuktikan dengan tingkat kemajuan yang mencapai rata-rata tiap indikator sudah diatas 60%. Diharapkan untuk ditahun berikutnya bisa mencapai tingkat kemajuan yang lebih baik lagi.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/
Kabupaten/Kota**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional/Provinsi>Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatkan Kepegawaian Daerah Yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	57,27	Provinsi Sumatera Utara 62,37	91,82 %
2	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN	Persentase pelaksanaan diklat berdasarkan AKD	80	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 80	100 %
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	75,27 poin	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 71,21	105,70 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,42 poin	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 90,25	106,83 %

Sumber : BKN Kanreg IV, BKPSDM Deli Serdang, Bagian Organisasi Setdakab Deli Serdang

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Kepegawaian Daerah Yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	71 poin	57,27 poin	80,66 %	1. Kurangnya anggaran untuk meningkatkan kompetensi ASN 2. Tidak terdatanya ASN pada OPD yang mengikuti Bimtek, kursus, workshop dll	1. Akan dibuat rencana agar ASN bisa mendapat kesempatan utk mengembangkan kompetensinya 2. Akan dibuat aturan, agar OPD yang melakukan kegiatan bimtek, workshop agar tetap melaporkannya kegiatan nya ke BKPSDM
2	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN	Persentase pelaksanaan diklat berdasarkan AKD	80 %	80 %	100 %	Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi sudah sesuai dengan AKD yang disusun oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	-

3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	73 poin	75,27 poin	103.10 %	peran aktif BKPSDM dalam mempersiapkan dan melengkapi dokumen yang diminta Inspektorat Kabupaten untuk penilaian LKIP Perangkat Daerah	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 poin	96,42 poin	112,11 %	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BKPSDM telah baik	akan terus melakukan perbaikan dan memaksimalkan pelayanan

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Tw IV
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Deli Serdang

Uraian penjelasan tabel :

Dari uraian diatas dapat diberitahukan bahwa terdapat 1 indikator yang tidak terealisasi target dari yang sudah ditetapkan, yaitu indikator *Indeks Profesionalitas ASN* , sehingga perlu tindak lanjut dan solusi yang akan dilakukan pada rencana kerja tahun berikutnya.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Profesionalitas ASN	71 poin	57,27 poin	80,66 %	3.386.214.169	2.071.790.418	61,18 %	1.314.423.751
2	Persentase pelaksanaan diklat berdasarkan AKD	80 %	80 %	100 %	3.826.620.544	2.371.844.055	61,98 %	1.454.776.489
3	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	73 poin	75,27 poin	103.10 %	10.374.196.958	8.737.430.363	84,23 %	1.636.766.595
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 poin	96,42 poin	112,11 %				

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Tw IV
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Deli Serdang

Uraian penjelasan tabel:

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, dari realisasi yang didapat tiap sasaran

yang rata-rata sudah diatas 60% bahkan ada sasaran yang realisasi melebihi 80%, tetapi BKPSDM tetap bisa menghemat penggunaan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi anggaran yang tidak mencapai 100%.

3.1.8 Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN	80,66 %	Menunjang	
1.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase SubKegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang Terlaksana	100 %	Menunjang	
1.1.1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	50 %	Tidak Menunjang	
1.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	93 %	Menunjang	
1.1.3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang di fasilitasi	100 %	Menunjang	
1.1.4	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	100 %	Menunjang	
1.2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase SubKegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang terlaksana	100 %	Menunjang	
1.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	181,6 %	Menunjang	
1.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	111,3 %	Menunjang	
1.2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	83,3 %	Menunjang	
1.3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang Terlaksana	100 %	Menunjang	

1.3.1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	113 %	Menunjang	
1.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SubKegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terlaksana	100 %	Menunjang	
1.4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	100 %	Menunjang	
1.4.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	203,3 %	Menunjang	
1.4.2	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	90 %	Menunjang	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pelaksanaan diklat berdasarkan AKD	100 %	Menunjang	
2.1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase SubKegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang terlaksana	100 %	Menunjang	
2.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	94,36 %	Menunjang	
2.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SubKegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terlaksana	100 %	Menunjang	
2.2.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	75 %	Menunjang	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	75,72 %	Menunjang	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	95,05 %	Menunjang	
3.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase SubKegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	Menunjang	
3.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	Menunjang	
3.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase SubKegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	Menunjang	
3.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerimagaji dan tunjangan ASN	100 %	Menunjang	
3.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100 %	Menunjang	

3.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SubKegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	Menunjang	
3.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100 %	Menunjang	
3.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase SubKegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	98,25 %	Menunjang	
3.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 %	Menunjang	
3.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 %	Menunjang	
3.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 %	Menunjang	
3.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100 %	Menunjang	
3.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan pengadaan yang disediakan	100 %	Menunjang	
3.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100 %	Menunjang	
3.4.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	100 %	Menunjang	
3.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	Menunjang	
3.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase SubKegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	50%	Tidak Menunjang	
3.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 %	Tidak Menunjang	
3.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	0 %	Tidak Menunjang	
3.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase SubKegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	Menunjang	
3.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100 %	Menunjang	
3.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase SubKegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	Menunjang	
3.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100 %	Menunjang	
3.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70,1 %	Menunjang	
3.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah saran dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	100 %	Menunjang	

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Tw IV
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Uraian penjelasan tabel:

Dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada, ada 2 Sub Kegiatan yang dianggap tidak menunjang keberhasilan program yang ada, yaitu :

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN yang hanya terealisasi sebesar 50 %, dikarenakan tidak terealisasinya kegiatan pengadaan CPNS sehingga anggaran yang sudah disusun tidak bisa digunakan.
2. Pengadaan Mebel yang teralisasi hanya 0%, disebabkan adanya save blocking yang diatur oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.386.214.169	2.071.790.418	61.1
1.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.568.625.277	519.143.271	33.1
1.2	Mutasi dan Promosi ASN	1.436.055.780	1.243.905.773	86.6
1.3	Pengembangan Kompetensi ASN	78.476.042	73.576.042	93.8
1.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	303.057.070	235.165.332	77.6
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.826.620.544	2.371.844.055	61.9
2.1	Pengembangan Kompetensi Teknis	2.136.290.893	1.857.890.101	87.0
2.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.690.329.651	513.953.954	30.4
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.374.196.958	8.686.385.63	83.7
3.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	420.236.122	359.848.122	85.6

3.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.840.376.038	5.607.841.412	82.0
3.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.006.000	51.045.000	89.5
3.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.125.382.430	1.076.003.313	95.6
3.5	Pengadaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	531.699.000	467.900.000	88.0
3.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.793.600	417.234.601	96.0
3.7	Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	964.703.768	757.557.915	78.5

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Tw IV
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Deli Serdang

Uraian penjelasan tabel:

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran cukup baik sudah diatas rata-rata 50%, hanya ada 1 kegiatan yang realisasi masih dibawah 50% yaitu , Pengadaan Mebel yang hanya terealisasi 0%, dikarenakan save blockinganggaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023. Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang memiliki 4 sasaran strategis dengan 3 sasaran strategis tercapai dan 1 sasaran strategis tidak tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang adalah kurangnya nilai *Indeks Profesionalitas ASN* yang disebabkan kurang maksimalnya anggaran untuk mengembangkan kompetensi ASN, dan masih rendahnya minat ASN untuk melaksanakan pengembangan kompetensi dan hal ini menjadi perhatian serius dan akan ditingkatkan pada tahun 2024.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perludilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

1. Lebih mengoptimalkan anggaran yang ada untuk meningkatkan kompetensi

ASN yang ada.

2. Membuat aturan yang mengharuskan OPD yang akan melakukan atau mengadakan Bimtek, Workshop, Sosialisasi dan sejenisnya, diharapkan berkoordinasi ke BKPSDM guna mendata ASN yang mendapat kesempatan pengembangan kompetensi.
3. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Lubuk Pakam, Januari 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN DELI SERDANG**



Drs. M. ABDUH RIZALI SIREGAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021991011002